

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN IKLAN DI TVRI PADA TAHUN 1981-2002**MEMO LEO ANUGRAH**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: memoleoanugrah4@gmail.com

Artono

S1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

TVRI sebagai media penyiar pada awal tahun 1962 dengan tayangan perdana yaitu Asian Games di Indonesia, peran Indonesia sebagai tuan rumah menjadi prioritas utama dalam penyiaran. Peran TVRI di masa kepemimpinan Soeharto terdapat beberapa kebijakan untuk TVRI terutama penutupan iklan. Dalam Skripsi ini penulis mencoba menganalisis tentang politik yang diterapkan oleh Soeharto pada TVRI. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang digunakan untuk menyusun fakta, mendeskripsikan, dan menarik kesimpulan tentang masa lampau. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam metode sejarah yaitu memilih topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan iklan di TVRI pada tahun 1981, penghapusan tersebut disebabkan karena tidak adanya siaran iklan untuk membantu program pembangunan dalam arti iklan pada saat itu kurang mendidik, dari dampak pelarangan tersebut berkurangnya dana bagi TVRI, kurangnya tantangan bagi warga negara asing untuk bekerja di Indonesia. Alasan lain ditutupnya iklan di TVRI yaitu agar terdapat pemerataan iklan terutama di media cetak atau media lain. TVRI berusaha bertahan dari politik yang dibuat Soeharto dengan pengumpulan dana dari masyarakat setempat dan pendanaan dari pemerintah yang minim.

Kata Kunci: TVRI, Kebijakan Politik, Iklan.

Abstract

As a media broadcaster TVRI in early 1962 with impressions of Prime that is the Asian Games in Indonesia, Indonesia's role as a host to be a top priority in broadcasting. The role of Soeharto's leadership in TVRI, there is some kebijakan to TVRI especially the closure of the ad. In this Thesis the author tried to analyze about politics applied by Soeharto on TVRI. Data collection is done using historical methods used to compile the facts, mendeskripsikan, and draw conclusions about the past. As for activities performed in the method of choosing the topic, i.e., the history heuristic, criticism, interpretation, and historiography.

Based on the results of the research show that the closure of advertising on TVRI in 1981, the deletion due to the lack of broadcast ads to help development program within the meaning of the ad at that time less educate, from the effects of prohibition the depletion of funds for TVRI, the lack of challenge for foreign citizens to work in Indonesia. Another reason for the banning of advertising on TVRI i.e. so that there is equitable distribution of advertising especially in print or other media. TVRI trying survive from Suharto made with political fund-raising from the local community and funding from the Government. **Keywords:** TVRI, Political Policy, Advertising

PENDAHULUAN

Media massa saat ini semakin beragam dan berkembang pesat seperti munculnya televisi, surat kabar, radio, internet dan media lainnya. Media massa digunakan untuk komunikasi dan hiburan, komunikasi yang memanfaatkan penggunaan media massa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat sehari-hari

sebab komunikasi merupakan bagian penting untuk umat manusia. Pada jaman orde baru, alat komunikasi yang digunakan adalah telepon, televisi, dan radio.

Media massa yang umumnya banyak digunakan dan disukai oleh masyarakat adalah televisi. Perkembangan televisi yang sangat pesat sudah menjadi fenomena abad ini sejalan dengan perkembangan elektronik. Televisi berperan besar dalam mempengaruhi

pola pikir masyarakat, serta perkembangannya sudah merambah pada aspek teknologi, ekonomi, politik, dan aspek kehidupan masyarakat lainnya.

Perkembangan televisi juga berkembang pesat di Indonesia, televisi memiliki kontribusi dalam segala perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat teori serba modern yang mengungkapkan bahwa media massa mempengaruhi masyarakat dalam membentuk pola pikirnya.

Kemunculan televisi di Indonesia pertama kali pada tahun 1981, yaitu TVRI. Sebagai televisi pertama dan satu-satunya di Indonesia pada saat itu, TVRI sudah mampu menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dengan bantuan satelit komunikasi ruang angkasa yang digunakan sebagai alat informasi pemerintah kepada masyarakat. TVRI pada tahun 1990 menjadi sumber informasi satu-satunya bagi masyarakat sehingga digunakan sebagai alat propaganda oleh pemerintah pada saat itu. Akibatnya, iklan apapun yang ditayangkan di dalam televisi harus bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah. Namun banyaknya kontroversi dalam penayangan iklan pada saat itu mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menutup asset beriklan di TVRI dengan alasan bahwa iklan yang ditayangkan di TVRI tidak ada nilai positif terutama untuk anak-anak.

TVRI sempat menayangkan acara iklan khusus yang berjudul *Mana Suka Siaran Niaga* yang ditayangkan dua kali dalam sehari. TVRI tidak diperbolehkan menayangkan iklan semenjak April tahun 1981 sampai akhir 90-an, tetapi setelah akhir tahun 90-an TVRI diperbolehkan untuk menayangkan iklan kembali. Status TVRI saat ini adalah Lembaga Penyiaran Publik dan setengah dari biaya operasional untuk TVRI ditanggung negara.

Pada tahun 1989 pemerintah membuka kembali izin didirikannya televisi swasta, sejalan dengan kemajuan demokrasi dan kebebasan berekspresi. Rajawali Citra Televisi atau RCTI memulai siaran pertamanya tepat pada tanggal 24 Agustus 1989. Saat itu siaran televisi hanya mampu dijangkau pada wilayah jabotabek saja.

Kemunculan stasiun televisi RCTI disusul berurutan oleh stasiun televisi Surya Citra Televisi (SCTV) tahun 1990 dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) pada tahun 1991. Pada tahun 1993 siaran nasional SCTV dan RCTI mulai ditayangkan dan pada tahun 1994 berdiri ANTV dan Indosiar. Secara nasional sampai saat ini terdapat 11 stasiun televisi yang mengudara, selain stasiun-stasiun yang sudah bermunculan terlebih dahulu juga muncul beberapa stasiun televisi seperti Trans TV, Global TV, Lativi, Metro TV dan TV7. Berbagai program televisi seperti kuis, talkshow, opera sabun sampai variety show juga diperkenalkan kepada masyarakat. Masyarakat lisan dan baca berubah menjadi masyarakat televisi. Migrasi secara besar akibat media

yang merubah seluruh aspek kehidupan mendapatkan efek dari televisi. Ekonomi masih mengalami krisis ketika kemunculan stasiun televisi swasta meningkat pesat dan status maupun peran televisi nasional masih diatur oleh Undang-Undang Penyiaran yang juga masih mengalami pro kontra dalam pertelevisian. Pemerintah membuka kebijakan untuk kebebasan pers dalam era reformasi sekarang ini. Di dalam bidang jurnalistik cetak maupun elektronik yang tidak terkecuali media televisi juga hal ini merupakan sesuatu yang baru. Perkembangan dan penyebaran stasiun-stasiun tv lokal yang berdiri di beberapa daerah merupakan sesuatu hal yang paling mencolok. Namun masih banyaknya dijumpai stasiun televisi lokal yang belum begitu maju dan terkesan atau bahkan gulung tikar dikarenakan kurangnya SDM (sumber daya manusia) maupun kekurangan yang berasal dari faktor manajemen perusahaan yang kurang produktif atau kurang membidik peluang program siaran kelokalan yang cocok untuk audience lokal. Dapat dilihat perbandingan antara televisi lokal yang berusaha berjuang untuk menarik pemirsa lokal nya dengan tv nasional dengan adanya program acara yang dapat menjangkau pemirsa televisi secara luas.

METODE PENELITIAN

Mengungkapkan sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau dalam menulis sejarah, memerlukan sebuah pendekatan guna menjadi suatu rangkaian sejarah yang utuh. Penelitian mengenai “Kebijakan Penghapusan Iklan di TVRI Pada Tahun 1981-2002” menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengujian, dan analisis rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis dengan menggunakan analisa logis. Pendekatan sejarah memiliki empat tahapan proses penelitian yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

1. Heuristik

Heuristik atau juga bisa disebut langkah awal sebagai pengamatan merupakan metode utama yang di gunakan dalam penelitian, dan merupakan alat mengumpulkan beberapa daya untuk di lakukan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber dan data-data, terdapat sumber-sumber buku atau sumber yang berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul dari peneliti tersebut. Dalam tahapan ini yang pertama dilakukan peneliti mengumpulkan sumber-sumber yang relevan sebanyak-banyaknya baik itu berupa sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu kebijakan penghapusan iklan pada tahun 1981-2002, dibuktikan dengan adanya data dan sumber yang isinya berkaitan dengan politik di masa orde baru yang dipimpin Soeharto, dimana politik itu akan dikaitkan dengan efek samping dari penutupan iklan di TVRI. Sumber lain yang mendukung dari skripsi ini yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang relevan. Hal ini

dilakukan peneliti untuk menyelesaikan skripsi. Dan sumber-sumber buku maupun jurnal yang ditemukan peneliti yaitu berasal dari daerah perpustakaan provinsi Jawa Timur, perpustakaan Medayu Agung Surabaya yang dimiliki oleh Pak Wik, dan dinas perpustakaan dan kearsipan kota Surabaya.

2. Kritik

Dalam proses menguji sumber terhadap kredibilitas dan otentisitas sumber. Kritik yang digunakan oleh peneliti yaitu kritik intern karena peneliti melakukan pengujian terhadap isi sumber tersebut. Setelah melakukan proses kritik sumber primer maupun sekunder sudah dianggap sebagai fakta atau kebenaran.

Untuk kegiatan ini peneliti memilih sumber dari perpustakaan daerah provinsi Jawa Timur yaitu data arsip dan jurnal dan beberapa Koran Kompas dan tempo yang terbit pada tahun 1980-1981. Dalam pengelompokan sumber disusun sesuai urutan hingga data-data tersebut diperoleh fakta-fakta sejarah. Dan penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing terhadap sumber-sumber yang didapat untuk mengetahui rehabilitas dan potensi data penunjang yang terkandung dalam sumber sejarah tersebut. Kemudian peneliti juga membandingkan data yang telah tersusun dalam beberapa literatur seperti kebijakan pada saat itu dan lain-lain.

3. Interpretasi

Untuk tahapan ini fakta-fakta sejarah ditafsirkan dan di analisis serta dihubungkan dalam rangkaian kronologis sehingga didapat alur yang sistematis. Interpretasi atau penafsiran pada tahapan ini sejarawan mencari hubungan antar berbagai fakta yang telah ditemukan kemudian menafsirkannya.

Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan menghubungkan data yang telah diperoleh hipotesis yang telah dibentuk dengan berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, dari data-data tersebut peneliti melakukan analisis untuk dapat mengetahui jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini penulis berfokus pada politik yang diterapkan oleh Soeharto untuk TVRI. Untuk itu peneliti melakukan penyusunan peristiwa secara kronologis sejak dari propaganda yang dilakukan Soeharto untuk TVRI yang melarang iklan untuk ditayangkan sampai dengan iklan diperbolehkan untuk ditayangkan kembali di TVRI.

4. Historiografi

Dalam hal ini peneliti menyampaikan sintesis yang diperoleh dalam bentuk tulisan atau dengan kata lain penyampaian laporan hasil penelitian sejarah setelah melewati tahapan-tahapan yang terdapat di atas dalam bentuk karya sejarah (historiografi).

Dalam tahap ini fakta-fakta yang terkumpul kemudian digabungkan dan dituangkan dalam bentuk

tulisan yang deskriptif dan analitis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah tata bahasa agar komunikatif dan mudah dipahami oleh pembaca. Hasilnya yaitu tulisan sejarah yang bersifat deskriptif analitis, Kegiatan ini merupakan tahapan akhir dari teknik penulisan dalam bentuk skripsi yang disusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Berdirinya TVRI

TVRI pertama kali didirikan sebagai "proyek media massa khusus" sebagai bagian dari persiapan Asian Games dan dikoordinasi oleh Biro Radio dan Televisi yang baru dibentuk di bawah arahan Komite penyelenggara Asian Games Keempat. Tanggal 17 Agustus 1962 stasiun televisi TVRI melakukan siaran untuk pertama kali, dengan menyiarkan siaran langsung Pidato Presiden RI yang menyambut hari kemerdekaan RI di Istana Merdeka Jakarta. Siaran tersebut merupakan siaran percobaan TVRI. Tetapi TVRI baru secara resmi mengudara pada saat upacara pembukaan Asian Games 1962.

Setelah Asian Games berakhir pada awal September, Menteri Maladi dan Menteri Informasi Mohamad Yamin bertukar disposisi masa depan TVRI. Setelah kematian Mohamad Yamin pada bulan Oktober 1962, Soemartono mencatat bahwa Departemen Informasi berpendapat bahwa TVRI harus menjadi bagian dari operasinya, karena memang ada efisiensi dalam menjaga operasi radio dan televisi bersama. Jenderal Suprayogi, yang bertanggung jawab atas operasi selama Asian Games dan juga Menteri Pekerjaan Umum dan Energi, menentang menggabungkan TVRI ke departemen, sebagai keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu adalah besar kekhawatiran, dan itu di luar membayangkan bahwa pemerintah akan mampu mendanai dengan baik operasi dan pengembangan televisi.¹

Namun hal lain setelah Asian Games berakhir, TVRI kemudian mendapatkan landasan hukum melalui Keputusan Presiden No 215/1963 yang diterbitkan Pemerintah mengenai Pembentukan Yayasan stasiun televisi TVRI dengan ketua yayasan Presiden RI. Salah satu pasal dalam Keppres itu menyebutkan, bahwa Yayasan stasiun televisi TVRI merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan membangun serta menyelenggarakan tayangan televisi di Indonesia. Maka pada saat itu TVRI merupakan alat komunikasi pemerintah yang tugasnya adalah untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada rakyat dan memberikan berita dan informasi pemerintah untuk rakyat.

Dalam masa itu, TVRI tampak diberi kelonggaran sebagai stasiun pemerintah dengan isi yang

¹Murdock, Graham, and Peter Golding. 1989. "Information Poverty and Political Inequality:

Citizenship in the Age of Privatized Communications." *Journal of Communication* 39 (3): 180–95.

lebih berorientasi pada penyajian hiburan dan lebih mandiri dengan memperoleh pemasukan utama dari iklan. Baru selama 17 tahun sesudahnya, TVRI diposisikan sebagai media propaganda pemerintah untuk mendukung rezim yang berkuasa. Karena berstatus sebagai Yayasan, maka pada 1970-1980, TVRI memiliki kebebasan keuangan karena berhak mengumpulkan dan membelanjakan uang tanpa pertimbangan apapun dari pemerintah. Sebuah data menunjukkan (Ishadi, 1982) bahwa pemasukan dari sektor periklanan mencapai lebih dari 51% pendapatan TVRI. Perusahaan-perusahaan asing yang memproduksi barang-barang konsumsi segera menangkap peluang untuk menjadi motor utama yang menggerakkan dunia periklanan di Indonesia. Jadilah, 73% iklan di TVRI merupakan iklan produk impor sementara hanya 27% yang memperdagangkan barang produk domestik. Perlu dicatat, selain iklan, TVRI masih memperoleh subsidi dari pemerintah dan berhak memungut iuran televisi dari masyarakat. Pegawai TVRI saat itu memperoleh pendapatan di atas rata-rata PNS karena tidak tunduk kepada struktur penggajian pegawai negara.

Sampai pertengahan tahun 1970-an, menyimak popularitas TVRI, sebuah tim yang dibentuk oleh Menteri Penerangan pada tahun 1973 menyimpulkan supaya daya jangkauan siaran televisi diperluas dan untuk itu dipandang perlu Indonesia memiliki sistem satelit komunikasi domestik. Di samping itu, perlu memanjakan investor asing dengan infrastruktur komunikasi yang memadai dan secara politik efektif untuk mewujudkan doktrin Wawasan Nusantara. Sekalipun dinilai sebagai proyek mercusuar, akan tetapi gagasan itu spontan diterima Soeharto dan ia pun memberi nama satelit itu "Palapa." Satelit ini diluncurkan pada tahun 1976 dan saat itu menempatkan Indonesia sebagai negara ke-4 di dunia yang mengelola satelit domestik setelah Amerika, Uni Soviet, dan Kanada. Satelit itu pun kemudian disewakan kepada negara ASEAN dan negara lain, termasuk Jepang.

Dan bagi TVRI, sekalipun awalnya tidak siap mengoperasikan sistem transmisi penyiaran dengan satelit itu, akan tetapi segera memperoleh manfaat. Dalam 4 tahun sesudahnya, TVRI mampu memperluas layanan televisi hingga hampir 5 kali wilayah yang terjangkau siaran pada 1975/1976. Jika pada 1976 tercatat ada 512 ribu pesawat televisi, pada 1980 jumlah itu sudah melonjak menjadi hampir 2,2 juta. Jika pada 1974, siaran televisi hanya menjangkau 3,16% wilayah Indonesia dan 93% wilayah Jawa, maka pada 1980/1981 sudah menjangkau 60% jumlah penduduk Indonesia dapat menikmati siaran televisi. Sesudah peluncuran satelit Palapa, jumlah pesawat televisi di luar Jawa

terdaftar meningkat 133% di Sumatera Utara, 257% di Sumatera Barat, 235% di Sulawesi, dan 165% di Kalimantan. Sampai tahun 1972, TVRI baru mempunyai 13 satuan transmisi yang menjangkau Jawa dan Sumatera Utara, sehingga baru 24,7% penduduk yang dapat menikmati siaran televisi. Dalam 10 tahun berikutnya, sudah terbangun 172 transmisi dan 64,1% penduduk dapat menikmati siaran televisi.²

Dengan demikian, TVRI mempermudah pemerintah dalam menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah sampai ke pelosok tanah air. Keputusan Presiden No 215 Tahun 1963, pasal 4 dan 5, menyebutkan bahwa Yayasan TVRI bertujuan untuk menjadi alat yang menghubungkan masyarakat (mass-communication-media) untuk melaksanakan pembentukan mental/spiritual maupun fisik pada bangsa dan negara Indonesia dan khususnya untuk membentuk manusia sosialis Indonesia. Jangkauan siaran TVRI bahkan mencapai seluruh wilayah Indonesia melalui stasiun-stasiun TVRI daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut kegiatan TVRI meliputi antara lain:

1. Melakukan kegiatan di bidang penerangan, pendidikan, ilmu pengetahuan, keagamaan, olah raga, kesenian/kebudayaan, dan hubungan kebudayaan antar negara.
2. Melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian (investigation and research) menuju kepada kesempurnaan perkembangan, baik programatis maupun teknis dalam bidang penyiaran televisi.
3. Dalam melakukan kegiatan tersebut dengan memperhatikan asas-asas ekonomi perusahaan, dengan mengusahakan daya guna yang setinggi-tingginya dan kemungkinan swadaya yang sebesar-besarnya.

TVRI menjadi salah satu bagian dari sebuah lembaga dan tata kerja Departemen Penerangan pada tahun 1974 yang berstatus sebagai Direktorat yang memiliki tanggung jawab kepada Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Memasuki era Reformasi, muncul Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2000 yang mengubah status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan di bawah naungan Departemen Keuangan. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 TVRI diubah statusnya menjadi PT. TVRI (Persero) di bawah naungan Kantor Menteri Negara BUMN. Melalui UU RI No 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, TVRI berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang berbentuk badan hukum dan didirikan oleh Negara.

Pembangunan TVRI tidak hanya di Jakarta saja, melainkan terdapat di berbagai provinsi di seluruh

² Antlov, Hans. 1995. *Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural Leadership and the New Order in Java*. Richmond, Surrey: Curzon Press.

Indonesia. TVRI menjadi media idola masyarakat. Siaran televisi saat itu didominasi oleh tayangan impor. Sampai tahun 1972, lebih dari 1/3 acara TVRI merupakan film dan hampir semua film adalah impor dan menggunakan dialog asing. Tabel dibawah menginformasikan jumlah stasiun TVRI pada saat itu.

Tabel 1. Jumlah Stasiun Penyiaran TVRI

No	Stasiun penyiaran	No	Stasiun penyiaran
1	Kantor pusat TVRI	16	Wilayah Kalimantan Tengah
2	Wilayah DKI Jakarta	17	Wilayah Kalimantan Timur
3	Wilayah Jawa Barat	18	Wilayah Kalimantan Selatan
4	Wilayah Jawa Tengah	19	Wilayah Sulawesi Selatan
5	Wilayah Jawa Timur	20	Wilayah Sulawesi Utara
6	Wilayah Yogyakarta	21	Wilayah Sulawesi Tengah
7	Wilayah Bali	22	Wilayah Sulawesi Barat
8	Wilayah Aceh	23	Wilayah Sulawesi Tenggara
9	Wilayah Utara	24	Wilayah Gorontalo
10	Wilayah Sumatra Selatan	25	Wilayah Maluku
11	Wilayah Sumatra Barat	26	Wilayah Riau
12	Wilayah Bengkulu	27	Wilayah NTT
13	Wilayah Lampung	28	Wilayah NTB
14	Wilayah Jambi	29	Wilayah Papua
15	Wilayah Kalimantan Barat		

Sumber: Arsip TVRI 1 Februari 2013

B. Latar Belakang Munculnya Iklan

Dalam periklanan di Indonesia di ibaratkan dua sisi mata uang, gambaran kedekatan hubungan antara pers dan iklan. Keduanya terlihat bersamaan, bertumbuh dan mati bersama. Ketika biro pers mulai di perhatikan, masalah iklan juga ikut di dalamnya. Pemikiran tentang biro pers dan biro reklame sudah di mulai sejak kemunculan surat kabar harian Indonesia di solo pada tahun 1932.

Secara garis besar iklan dapat diartikan sebagai sarana mengenalkan produk-produk baru yang utama kepada konsumen yang sangat cocok dengan konsumen. Dapat dikatakan permulaan seperti pemasaran produk-produk baru. Beriklan juga bisa dilakukan dengan beberapa media, contohnya seperti media elektronik (televise). Dengan melewati media ini pesan iklan bisa tersampaikan dalam bentuk visual, audio, dan gerak. Melewati media televise, cara beriklan lebih mudah menyampaikan kepada konsumen. Di dalam ruang lingkup Indonesia lewat media masa tv sebesar 53%-61% dalam kurun waktu 1996-2003 dalam biaya beriklan oleh masyarakat yang berbisnis memperlihatkan dominasi alokasi yang signifikan. Yang menjadi jalan pintas dominasi ini memiliki daya untuk memikat konsumen secara instan hanya dengan cara melihat tv. Dikarenakan tv mempunyai kemampuan tersendiri disaat iklan berlangsung. Kemampuan televisi dapat mempengaruhi dan bahkan dapat membuat konsumen membangun persepsi yang kuat terhadap konsumen, sehingga para pemirsa atau konsumen akan mudah

tertarik dan lebih percaya terhadap perusahaan yang beriklan di tv dari pada melihat iklan di media lain. Menurut Lee (2004) iklan adalah sebuah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke khalayak ramai dengan target melalui media yang bersifat masal seperti televise, radio, Koran, majalah, direct mail reklame luar ruangan atau kendaraan umum.

Memasuki periklanan modern, Periklanan modern di Indonesia di mulai dari pemberlakuan undang-undang penanaman modal asing tahun 1967 dan undang-undang penanaman modal dalam negeri tahun 1968. Sejak itu perusahaan multinasional merambah pasar local. Terlebih lagi pertumbuhan perekonomian yang cerah sejak orde baru membuat pasar Indonesia menjadi penting bagi produk-produk mancanegara yang berasal dari Amerika, Jepang, dan Eropa. Pada tahun 1976 misalnya produk yang dilakukan adalah produk impor.

Kemunculan perusahaan multinasional tersebut ikut mendorong pertumbuhan perekonomian dan dampaknya juga dirasakan perusahaan periklanan nasional. Seperti yang di tulis Soebagijo I.N. survei yang di lakukan Muhammad Napis, ketua PBRI yang juga pemilik biro reklame Bhineka, dan stafnya menunjukkan bahwa omzet untuk pemasangan iklan pada tahun 1971 berjumlah sekitar Rp 2,5 miliar, masing-masing dipasang surat kabar 45%, bioskop 13%, TVRI 11%, majalah 1,5%, radio 3,5% outdoor 9%, dan lain-lain 14%. Dari jumlah itu biro reklame Bhineka hanya mendapat Rp 126 juta. Artinya pertumbuhan perekonomian yang membaik sebagai dampak masuknya investasi asing sudah tentu akan akan berdampak baik pada perkembangan perusahaan periklanan Indonesia.

Pelopop periklanan modern Indonesia adalah interVitas Advertising yang didirikan oleh Nuradi pada tahun 1963. Nuradi sendiri adalah seorang diplomat lulusan pendidikan luar negeri dalam bidang ilmu sosial dan administrasi publik di Foreign Service Institute US Departement, Wasington DC, dan studi bidang administrasi publik di Harvard University, Cambridge, Massacusettle. Setelah mengikuti Setelah mengikuti manajemen yang di selenggarakan oleh SH Benson di inggris, Nuradi lebih tertarik untuk menekuni periklanan. Dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaan prestisius dan menekuni bidang periklanan. Karirnya di bidang periklanan dimulai di SH Benson cabang singapura pada tahun 1962. Tahun berikutnya dia meninggalkan perusahaan tersebut dan pulang kembali ke tanah air untuk mendirikan Intervista Advertisisng.

C. Media Televisi di Masa Orba

Peran sebagai media propaganda ini dilanjutkan TVRI ketika pemerintahan Soekarno jatuh. TVRI yang baru berusia sekitar lima tahun tahan Orde Baru, sebagai media untuk menyampaikan suara pemerintah. Semangat ini tercemin dalam Keputusan Menpen No.34/1966, itu

dengan segera dilebur ke dalam mesin pemecah yang menyatakan bahwa fungsi TVRI adalah antara lain:

1. memberi penerangan seluas-luasnya dan menanamkan pengertian serta kesadaran yang mendalam-dalamnya mengenai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara serta Haluan Negara Republik Indonesia kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
2. memberi penerangan kepada masyarakat tentang program-program Pemerintah, Peraturan-peraturan Negara serta tindakan-tindakan pelaksanaannya yang dilakukan baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah.

Pada masa orba media masa sengaja diatur oleh Presiden Soeharto untuk memiliki manfaat ganda. Fungsi yang pertama dari media massa saat itu ialah menjadi industri yang berguna untuk mendobrak kemajuan iklim penanaman modal kearah yang lebih baik. Pada tahun 1970 terbukti berdatangan cukup banyak dan berbagai agency percetakan asing yang tertarik untuk menanam modal di Indonesia. Dapat dikatakan juga orba dan Soeharto saat itu telah membentuk media massa sebagai salah satu industri yang digunakan untuk mendukung perekonomian Negara.

Fungsi yang kedua dari media massa pada saat itu adalah sebagai partner pembangunan pemerintah. Hal ini membuat media cetak maupun elektronik harus senantiasa harus mendukung program-program pemerintahan orde baru. Kontrol kuat yang berasal dari pemerintahan terhadap media massa saat itu diumumkan dengan slogan-slogan. Dari hal tersebut mengakibatkan semua aspek dari media massa berada di bawah pengawasan ketat dan kuasa dari Soeharto.

Dengan adanya hal ini, tertutuplah sudah pintu hukum bagi pengadaan penyiaran publik yang benar-benar muncul dan diprakarsai serta dikelola oleh publik sendiri secara independen, terutama pada daerah lain di luar ibu kota negara Republik Indonesia.

D. Kondisi Geografis

Dari permulaan Orde Baru, angka-angka pertumbuhan makroekonomi sangat mengesankan (penjelasan lebih mendetail ada di bagian 'Keajaiban Orde Baru'). Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menyebabkan ketidakpuasan di masyarakat Indonesia karena pemerintah dianggap terlalu terfokus pada menarik investor asing. Sementara kesempatan-kesempatan investasi yang besar hanya diberikan kepada orang Indonesia yang biasanya merupakan perwira militer atau sekelompok kecil warga keturunan Tionghoa (yang merupakan kelompok minoritas di Indonesia tapi sempat mendominasi perekonomian).

Muak dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ribuan orang melakukan demonstrasi di tahun 1974 waktu Perdana Menteri Jepang melakukan kunjungan ke Jakarta. Demonstrasi ini berubah menjadi kerusuhan

yang besar yang disebut 'Kerusuhan Malari'. Itu adalah pengalaman yang mengerikan bagi pemerintahan yang baru karena hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah tidak bisa menguasai massa. Kwatir bahwa suatu hari mungkin akan ada perlawanan dari jutaan penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan, kebijakan-kebijakan baru (yang lebih menekan) dilaksanakan oleh Pemerintah. Dua belas surat kabar ditutup dan para jurnalis ditahan tanpa persidangan. Hal ini mendorong media melakukan sensor sendiri. Semua ketidakpuasan yang diekspresikan di publik (seperti demonstrasi) segera ditekan. Sisi ekonomi dari perubahan kebijakan ini - dan yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat Indonesia - adalah dimulainya usaha-usaha membatasi investasi asing dan kebijakan-kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi para pengusaha pribumi.

Dalam politik nasional, Suharto berhasil semakin memperkuat posisinya pada tahun 1970an. Produksi minyak domestik yang memuncak memastikan bahwa pendapatan negara berlimpah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program pengentasan kemiskinan. Namun, di dunia internasional, citra Indonesia memburuk karena invasi Timor Timur. Setelah berhentinya masa penjajahan Portugal dan deklarasi kemerdekaan Timor Timur pada 1975 - militer Indonesia dengan cepat menginvasi negara ini; sebuah invasi yang diiringi kekerasan. Pada tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila (lima prinsip pendirian Negara Indonesia yang diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1940an) sebagai satu-satunya ideologi mereka. Suharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tindakan-tindakan anti-Pancasila.

Bisa dikatakan bahwa di tahun 1980an, Suharto berada di puncak kekuasaannya. Setiap pemilu dimenangkan secara mudah. Terlebih lagi, dia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa. Sama dengan partai-partai politik dan pegawai negeri sipil, militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Suharto. Namun depolitisasi masyarakat Indonesia ini memiliki satu efek samping yang penting yaitu kebangkitan kesadaran Islam, terutama di kalangan kaum muda Indonesia. Karena arena politik adalah area tertutup, umat Muslim melihat Islam sebagai alternatif yang aman. Pada tahun 80-an gejolak politik yang di buat oleh soeharto dengan alasan agar politik dan sebagainya yang terdapat di dalam negeri bisa stabil dan normal,

E. Alasan TVRI Menghapus Iklan

Dalam masa orba saat itu banyak sekali perubahan mulai dari kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia. Stabilitas dalam politik yang saat itu dipulihkan, antara lain melarang aktivitas Partai Komunis Indonesia, dalam kebijakan ekonomi pemerintah membuka kesempatan

bagi asing untuk berinvestasi dan berhubungan dengan Negara-negara industri pabrik. Sebagai contohnya produk asing seperti Coca cola dari Amerika, Mitsubishi, Toyota, Fuji Film dari Jepang serta Singapore Airlines dari Singapura.

Pada saat itu kebijakan ekonomi pada rezim orba sangat baik dimanfaatkan biro reklame asing. Bagi biro reklame Indonesia kerjasama dengan biro reklame adalah suatu hal yang menguntungkan. Selain mendapatkan bantuan modal, mereka juga mendapatkan ilmu periklanan. Setelah pemerintah menyiarkan pesta olahraga Asian Games ke-4, TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi yang mempunyai program siaran niaga. Program yang mempengaruhi minat pembuat iklan yang mampu membayar mahal supaya iklan ditayangkan oleh TVRI. Hal tersebut membuat kekacauan pada industri pertelevisian karena pada saat itu masyarakat yang ingin iklannya ditayangkan di televisi harus menunggu selama berbulan bulan, alasan lain masyarakat mengetahui betul bahwa iklan di televisi lebih efektif dan bisa menjangkau seluruh warga di berbagai pelosok Indonesia. Berdasarkan hal tersebut pada 5 Januari 1981 presiden Soeharto mengumumkan bahwa siaran niaga di televise akan dilarang berlaku mulai pada tanggal 1 April. Dikarenakan alasan presiden Soeharto "untuk lebih mengarahkan televisi agar membantu program pembangunan (nasional) dan menghindari efek buruk (iklan) yang tidak mendukung semangat pembangunan. Alasan lain yang melatarbelakangi keputusan tersebut yaitu supaya ada pemerataan iklan terutama di media cetak.

F. Hutang Televisi

Berdasarkan perjanjian yang tertera pada No.375/SP/DIR/TV/1994, tanggal 7 Desember, TVRI adalah pemegang otoritas untuk memberikan izin pelaksanaan kegiatan penyiaran televise kepada lima stasiun televise swasta. Hal ini berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Izin Siaran Nasional Stasiun Penyiaran Televisi swasta yang dikeluarkan Departemen Penerangan tanggal 30 Januari 1993 No. 208/RTF/KI/I/1993. Perjanjian itu menyebutkan dalam kurun waktu 20 tahun atau selama TVRI tidak menyelenggarakan siaran niaga, penyelenggaraan siaran televise swasta diwajibkan membayar royalty sebesar 12,5 persen atas pendapatan bersih dari siaran niaga, penjualan materi siaran dan keuntungan penjualan buku-buku program sebagai kompensasi.

Berdasarkan addendum yang tertera pada no.53/AD/DIR/TV/1996, pembayaran royalty untuk tahun 1997 dapat dilakukan dalam 4 tahap dengan cicilan masing-masing RP 250juta, Rp 500 juta, Rp 750 juta, dan cicilan terakhir sebesar sisa hutangnya. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran royalty tersebut, maka televise swasta akan dikenakan denda dengan dasar perhitungan bunga deposito berjangka satu bulan pada Bank Pemerintah (BNI) yang berlaku saat itu.

G. Dana Bantuan Untuk TVRI

Seperti yang telah diketahui, pada akhir periode 1970-1980 sebenarnya TVRI sedang Berjaya dan makmur. Namun, tanpa mungkin terbayangkan sebelumnya, serangkaian hal terjadi pada awal dekade berikutnya yang mengubah total wajah pertelevisian Indonesia. Pemaparan konteks sejarah berikut ini diperlukan untuk beberapa alasan. Pertama, dengan gambaran ini akan bisa dipahami mengapa kemudian lahir kebutuhan akan kehadiran stasiun televisi swasta. Kedua, dan ini yang lebih penting, mengapa sistem televisi komersial yang lahir pada awalnya akan berformat jaringan. Perkembangan mengejutkan yang dimaksud adalah instruksi Presiden Soeharto yang datang tiba-tiba pada awal 1981 agar TVRI tak lagi menerima iklan. Banyak pihak mengaku tak membayangkan keputusan itu dikeluarkan.

Dalam keterbatasan anggaran, pemerintah tidak malu-malu mengakui bahwa TVRI memang dapat dijadikan sarana promosi dengan biaya tertentu atau memperoleh dana dari sumber-sumber yang kontroversial. Pada desember 1990 Dirjen RTF Alek Leo mengungkapkan bahwa pemasukan yang diperoleh dari kegiatan siaran "Aneka Ria Safari", "Album Minggu", dan "Selekt Pop" mencapai 100 juta/bulan. Dirjen juga mengungkapkan bahwa TVRI memperoleh sumbangan dari SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), sebuah program kupon berhadiah yang dituduh sebagai bentuk "judi terselubung", untuk biaya libutan Asian Games XI sebesar 250 juta.

Di luar media juga memberikan praktik-praktik pengutipan uang oleh TVRI untuk program-program berita mereka. Sebuah tulisan di kompas dalam rangka ulangtahun TVRI mengungkapkan bahwa untuk setiap berita pungutan resmi yang di bebaskan pada instansi departemen dan non departemen sebesar 100.000 untuk setiap 10 menit nerita tanpa suara. Dan 150.000 dengan suara, Untuk laporan tanpa suara sebesar 250.000 tiap 10 menit, dengan suara laporan menjadi 350.000.

Ketergantungan kepada pemerintah bukan saja berdampak pada pola anggaran yang birokratis, melainkan juga pada orientasi isi. TVRI menjelma menjadi media propaganda, bukan saja sebagai pemerintah, melainkan juga sebenarnya bagi kekuatan-kekuatan politik yang mendominasi pemerintahan.

H. Iklan Mulai Ditayangkan Kembali di TVRI

Dalam runtuhnya orde baru ini berdampak yang luar biasa bagi pers Indonesia. Pertama muncul dari keputusan Junus Yosfiah, Menteri Penerangan pada masa pemerintahan B.J Habibie, mantan wakil presiden yang menggantikan Presiden Soeharto, yang menghapus surat ijin usaha penerbitan pers. Keputusan tersebut disambut baik oleh insan pers. Berbagai penerbitan muncul, pers partisan dan Koran kuning. Pertumbuhan media cetak baru terus muncul di tahun-tahun berikutnya, dengan segmentasi tertentu. Kemunculan ini

membuat persaingan makin kompetitif, dan membuat pemain lama pasang strategi baru, terlebih peluang bisnis makin sempit salah satunya dengan munculnya suplemen-suplemen atau halaman tambahan di surat kabar atau majalah presiden Habibie yang berperan dalam pembuka sejarah pada era reformasi dalam melaksanakan politik di Indonesia dalam situasi yang terbuka serta melakukan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang akan dilakukan di bawah kekuasaan Presiden Habibie merupakan pemilu yang telah bersifat demokratis.

Pada pemerintahan B.J. Habibie disaat itu, masyarakat bebas mengutarakan pendapatnya di muka umum. Selain itu Presiden Habibie memfasilitasi ruang bagi siapapun yang ingin mengutarakan pendapat, baik dalam bentuk demonstrasi, rapat umum, maupun unjuk rasa. Tetapi khusus demonstrasi, setiap lembaga yang ingin melaksanakan demonstrasi harusnya memperoleh izin dari pihak kepolisian dan memutuskan tempat untuk melaksanakan demonstrasi tersebut.

Perubahan tatanan di masa reformasi merupakan suatu perubahan kehidupan masa lalu dengan kehidupan yang baru dan secara tidak langsung banyak hukum menuju kearah perbaikan. Di Indonesia pada tahun 1998 terdapat gerakan reformasi yang terjadi saat itu, suatu gerakan tersebut untuk perubahan dan pembaruan terhadap gejala yang utama yaitu politik dan dalam bidang ekonomi sosial dan hukum.

I. Konflik Internal

Walaupun TVRI sudah lepas dari penguasaan pemerintah orba namun setelah reformasi terdapat beberapa masalah di dalam TVRI. Kondisi TVRI diperparah oleh konflik internal antara direktur utama dan jajaran direktur yang lain. Berbagai pihak, sebenarnya menganggap Sumita figure yang cocok untuk membangun kembali TVRI. Sumita mempunyai kompetensi akademik, ia seorang doctor komunikasi lulusan perguruan tinggi ternama di Amerika Serikat. Ia cukup paham kondisi internal TVRI karena pernah lama bekerja di lembaga ini. Sebagai praktisi, Sumita juga berhasil melahirkan program yang bagus dan populer, serta turut andil dalam melahirkan praktisi televisi baru.

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa televisi TVRI memiliki sejarah tersendiri di masa orba (orde baru). Sejarah menuliskan bahwa suatu masa dimana TVRI harus bekerja keras dikarenakan dari pemerintah menyatakan bahwa iklan harus ditutup, hal ini menimbulkan kontroversi bagi kalangan bawah sebab ditutupnya iklan masyarakat kekurangan informasi yang lebih actual. Pesan yang terkandung dalam iklan layanan masyarakat mengandung pesan yang mengajak masyarakat akan kepedulianya dalam menghadapi sejumlah masalah sosial yang harus di hadapi pada iklan

layanan masyarakat. Dalam kebijakan iklan ditutup, Soeharto memiliki alasan tersendiri yaitu agar televisi membantu program pembangunan nasional dan menghindari efek buruk dari iklan yang tidak mendukung semangat pembangunan hal ini yang di sampaikan Soeharto untuk masyarakat. Dampak tersebut membuat pengiklan tidak dapat berkompetisi dalam televisi dikarenakan saat itu televisi menjadi populer. Ditutupnya iklan dikarenakan oleh banyaknya sisi nehatif dari penayangan iklan terutama berdampak buruk pada kalangan anak-anak yang saat itu

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian “Kebijakan Penghapusan Iklan di TVRI Pada Tahun 1981-2002”, disarankan untuk peneliti selanjutnya apabila menggunakan teori ekonomi sebaiknya data perhitungan lebih rinci karena data ekonomi lebih kompleks sehingga mempermudah peneliti mencari sumber dan dalam menyempurnakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, Hans. 1995. *Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural Leadership and the New Order in Java*. Curzon Press
- Cangara, Hafiet, dkk. 2006. *Dasar-Dasar Jurnalistik*. Makasar. Alaudin Pers
- Djamal, Hidajanto dan Andi Fachruddin. 2013. *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta. PT Kharisma Putra Utama
- Dwipayana G. 1982. *Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya*. Jakarta. PT Citra Kharisma
- Menteri Negara Sekretaris RI. 1996. *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Indonesia Tentang Penyiaran*. Jakarta. Sekretaris Negara
- Moeloeng, Lexy J. 1998. *Metode Penelitian*. Bandung. Remaja Karya
- Moran, Albert. 1993. *Moran's Guide to Australian TV Series*. New South Wales. Australian Film Television and Radio School
- Morissan. 2008. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Kencana: Prenada Media Grup
- Murdock, Graham, and Peter Golding. 1989. *Information Poverty and Political Inequality: Citizenship in the Age of Privatized Communications*. Journal of Communication

- Kitley, Philip. 1946. *Television, Nation, and Culture in Indonesia*. South Asia Series no.104
- Kriyntonono, Ramat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta. Kencana
- Kuswandi, Wawan. 1999. *Komunikasi Massa, sebuah analisis komunikasi*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Soemartono. 1991. *Televisi RI 24 Agustus 1962-24 Agustus 1991*. Majalah Lensa
- Sugiharto, Ranang Agung. 2009. *Televisi Lokal Sebagai Medium Pencitraan Lokalitas Daerah*. Surakarta. Fakulats Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta
- Sumarno, Marselli. 1996. *Dasar-Dasar Apresiasi Film*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suparyogo. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta. CV Rajawali Jakarta
- Syamsi Ibnu. 2000. *Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta. CV Rajawali
- Unde, Andi Alimuddin. 2014. *TV dan Masyarakat Pluralistik*. Jakarta. Prenada
- Wahyudi, JB. 1986. *Media Komunikasi Massa Televisi*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Wenats, AG Eka. 2010. *Regulasi, Globalisasi, dan Manajemen Dalam Media di Indonesia*. Jakarta. Yayasan Pusat Obor

